

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2025



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat serta karunianya, Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat dapat tersusun. Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) dimulai dengan usulan dari setiap Bidang dan juga dari Sekretariat. Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 memuat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD Tahun 2025). Selanjutnya Renja ini menjadi landasan atau pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2025

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja yang disusun Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 ini belum sempurna, untuk itu mohon masukan dan koreksi yang konstruktif dari semua pihak. Diharapkan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 ini dapat diimplementasikan demi memenuhi indikator capaian yang telah disepakati oleh seluruh stakeholder dan termuat di dalam dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Manggarai Barat demi mewujudkan Mabar Bangkit menuju Mabar Mantap.

Labuan Bajo, 25 Januari 2025

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Manggarai Barat



Maria Yuliana Rotok, MM

Pembina, IV/a

Nip : 19810509 201001 2 016

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Renja Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 perlu dilakukan perubahan seiring dengan adanya Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024. Penetapan Kabupaten Manggarai Barat sebagai destinasi pariwisata super prioritas berdampak kepada meningkatnya investasi bidang pariwisata yang cukup signifikan. Meningkatnya investasi tersebut diharapkan berbanding tegak lurus dengan jumlah kunjungan wisatawan dan berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Barat sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah sangat mempengaruhi kemampuan fiskal Pemerintah Daerah dalam mendanai program dan kegiatan pada Tahun 2025. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dengan mempertimbangkan:

- a. Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD); dan
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2024.

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud, terdiri atas:

- a. Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah;
- b. Penyajian rancangan Renja Perangkat Daerah;
- c. Rancangan Renja Perangkat Daerah;
- d. Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah;
- e. Penetapan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025, adalah:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781):

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 Nomor 219);
24. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 Nomor 76);
25. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 84 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 Nomor 84);

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 adalah untuk menjamin konsistensi di dalam Perencanaan dan Penganggaran, dan efektivitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah untuk mencapai tujuan organisasi, dan sebagai tolok ukur kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehingga didalam pelaksanaan program dan kegiatan khususnya di bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah nantinya benar-benar dapat terarah, terukur dan tepat sasaran serta terkendali sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik.

b. Tujuan

Penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan), serta lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;

1. Sebagai dasar penyusunan rencana anggaran perubahan Perangkat Daerah;

2. Menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat Latar belakang, maksud dan tujuan, landasan, hukum, dan sistematika penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Bab ini memuat : Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2024 dan Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini memuat Tujuan Sasaran, Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2025, dan Rancangan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Rencana Kerja dan pendanaan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025.

BAB IV. PENUTUP

BAB II.

EVALUASI RENJA TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat secara yuridis terbentuk di tahun 2021 melalui Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susuna Organisasi, Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024, Pendapatan Asli Daerah berada pada posisi 87,49% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.1

Evaluasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggara Barat
Tahun Anggaran 2024

NO	Uraian	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pajak Daerah	212.691.597.424	216.319.721.956	101,71
2	Retribusi Daerah	61.959.462.576	44.568.669.873	71,93
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.581.029.507	2.457.403.444	95,21
4	Lain-lain PAD yang Sah	35.875.491.332	10.606.813.064	29,57
	Total	313.107.580.839	273.952.608.337	87,49

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2024 pencapaiannya adalah sebesar 87,49 %, belum mencapainya target ini dipengaruhi oleh beberapa indikator PAD yang tidak mencapai target, yaitu Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang SAH, dan juga Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, sedangkan untuk indikator dari Pajak daerah realisasinya melampaui target yang ditetapkan dengan realisasi pencapaiannya sebesar 101,71 % dan untuk indikator Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan realisasi

pencapaiannya sebesar 95,21%. Beberapa faktor pendukung melampauinya target pajak daerah adalah sebagai berikut :

1. Adanya perbaikan manajemen pungutan terhadap pajak daerah.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan daerah
3. Membentuk Tim Pengawasan dan Penertiban Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Penyediaan Makanan dan /atau Minuman serta Jasa Perhotelan di atas Air di Kabupaten Manggarai Barat.
4. Adanya Penambahan Objek Pajak Daerah yang baru

Realisasi penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2024 sebesar Rp. 44.568.669.873 atau sebesar 71,93 % dari target sebesar Rp. 61.959.462.576,- .dari data tersebut menunjukkan bahwa Retribusi Daerah tahun 2024 mengalami penurunan. Hal tersebut terjadi karena penerimaan retribusi jasa Umum, Retribusi jasa usaha dan Perijinan tertentu belum mencapai target dengan alasan sebagai berikut:

1. Penerimaan retribusi jasa Umum berupa pelayanan kesehatan di RSUD Komodo realisasinya masih rendah yakni Rp. 25.621.422.923,00 atau 68% dari target Rp. 37.909.896.452, hal tersebut disebabkan karena:
 - a) Kapasitas Ruang Perawatan/Pelayanan di Rumah Sakit Umum Komodo masih terbatas. Kapasitas ruang perawatan/layanan yg tersedia di Gedung Baru belum beroperasi secara penuh karena masih ada pekerjaan lanjutan Tahap dua Pembangunan Gedung Baru dan juga masih kurangnya tenaga baik tenaga kesehatan maupun tenaga non kesehatan untuk mendukung Operasional Pelayanan terutama operasional layanan di Gedung Baru.
 - b) Masih ada pasien yg di rujuk ke Rumah Sakit lain yg secara klinisnya dapat dilayani di Rumah Sakit Umum Daerah Komodo.
 - c) Jenis layanan yang ada di Rumah Sakit Umum Komodo yang masih masih terbatas dan juga masih ada layanan yang belum tersedia di Rumah Sakit Umum Daerah Komodo.
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan masih Belum optimal Pelayanan Persampahan/Kebersihan

sehingga realisasinya masih rendah sebesar Rp. 2.034.146.684,-atau 76 % dari target Rp.2.692.821.040,-

3. Penerimaan retribusi jasa usaha dari pelayanan tempat rekreasi dan olahraga Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan tidak mencapai target disebabkan karena: Obyek penerimaan retribusi mengalami penurunan sejak dikeluarkannya kebijakan TNK menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sebagai dampaknya adalah banyak aktifitas diving dan snorkeling yang tidak membeli tiket karena operator dive beralasan melakukan diving dan snorkling di wilayah TNK. Terhadap praktik ini, dinas tidak mempunyai kekuatan untuk memaksa dive operator untuk membeli tiket karena tidak ada aturan yang mengikat setelah penarikan Perda Retribusi di TNK. padahal pada tahun 2022, KSOP menyumbang banyak PAD cukup besar, selain Cunca Wulang, Batu Cermin, Rangko, dan Puncak Waringin.

Disamping itu berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat juga harus mengalami penyesuaian untuk mencapai indikator kinerja utama yang tercantum di dalam RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026. Evaluasi dilakukan terhadap pencapaian target Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Hasil Evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Tabel 2.1.2

Evaluasi RKPD Tahun 2024

No	Sasaran	Program/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja (K) dan Anggaran (Rp.) Renja OPD Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja (K) dan Anggaran (Rp.) Renja Tahun 2024 (Triwulan I-III)	Tingkat Capaian (%) Kinerja (K) dan Anggaran (Rp) Renja Tahun 2024	
						I		II		III		IV						
				5		6		7		8		9		10		14 = 13 / 5 x 100%		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan rutin Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	100	8.887.699.002	587.179.557		5.364.108.974		1.079.025.148		1.541.595.213		8.571.908.892		96,45		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13.905.900	4.300.600		-		4.800.000		4.800.000		13.900.600		99,96		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	11.906.400													
						2	2.305.000	3	-	2	4.800.000		4.800.000	7	11.905.000	175	99,99	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,00	1.999.500													
						2	1.995.600	1	-	1		1		4	1.995.600	80	99,80	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.583.051.102	512.147.497		5.275.178.204		858.498.281		788.740.574		7.434.564.556		98,04		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27	7.113.891.102,00	35												
						418.517.497	35	5.163.358.204	43	727.178.281	43	656.350.574	156	6.965.404.556	100	97,91		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	469.160.000,00	3	93.630.000	3	111.820.000	3	131.320.000	3	132.390.000	12	469.160.000	100	100,00	

No	Sasaran	Program/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja (K) dan Anggaran (Rp.) Renja OPD Tahun Berjalan (2023)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								IV	Realisasi Capaian Kinerja (K) dan Anggaran (Rp.) Renja Tahun 2024 (Triwulan I-III)	Tingkat Capaian (%) Kinerja (K) dan Anggaran (Rp) Renja Tahun 2024		
					I		II		III								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14 = 13 / 5 x 100%							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			110.700.000	0	23.409.160		-	15.320.500		63.045.120		101.774.780		91,94	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	110.700.000,00	2	23.409.160		-	15.320.500	3	63.045.120	8	101.774.780	40	91,94	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			728.792.000		30.206.000		77.510.420		87.348.800		424.262.410		619.327.630		84,98
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	3.316.500,00												
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	59.244.700,00	1	167.000		900.000	1		1	470.000	1	1.537.000	100	46,34
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	80.000.000,00	3	6.404.400	3	11.499.600	3	1.155.400	3	27.149.650	12	46.209.050	100	78,00
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	26.000.000,00	1	8.777.600	1	4.251.000	1	27.543.400	1	16.202.000	4	56.774.000	100	70,97
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12		1	143.700	1	5.926.300	1		1	15.850.000	4	21.920.000	100	84,31
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	36.007.800,00												
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	12	246.630.000,00	3	800.000	3	26.025.500	3	1.400.000	3	145.000	12	28.370.500	100	78,79

No	Sasaran	Program/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja (K) dan Anggaran (Rp.) Renja OPD Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja (K) dan Anggaran (Rp.) Renja Tahun 2024 (Triwulan I-III)	Tingkat Capaian (%) Kinerja (K) dan Anggaran (Rp) Renja Tahun 2024		
						I		II		III		IV					
				5	6	7	8	9	10	14 = 13 / 5 x 100%							
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	7.399.500,00	3	2.599.500	3		3	-			9	2.599.500	75	35,13
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7	270.193.500,00	1	2.793.800		-		-	6	248.265.000	7	251.058.800	100	92,92
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			75.500.000,00		-		-		45.000.000,00		203.000,00	-	45.203.000		59,87
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4,00	75.500.000,00	0	-	-	-	1	45.000.000		203.000	1	45.203.000	1,00	59,87
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			34.150.000		4.502.900		5.055.450		8.463.250		13.039.600		31.061.200		90,96
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	19.750.000,00	3	2.400.000	3	4.004.000	3	3.218.500	3	8.843.800	12	18.466.300	100	93,50
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	14.400.000,00	3	2.102.900	3	1.051.450	3	5.244.750	3	4.195.800	12	12.594.900	100	87,46
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			338.600.000		12.613.400		4.365.900		58.594.317		247.504.509		323.078.126		95,42
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	110.000.000,00	2	11.413.400	4	4.365.900	2	57.094.317	2	34.031.900	10	106.905.517	100	97,19
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	228.600.000,00	3	1.200.000	-	-	3	1.500.000	6	213.472.609	12	216.172.609	100	94,56

No	Sasaran	Program/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja (K) dan Anggaran (Rp.) Renja OPD Tahun Berjalan (2023)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja (K) dan Anggaran (Rp.) Renja Tahun 2024 (Triwulan I-III)	Tingkat Capaian (%) Kinerja (K) dan Anggaran (Rp) Renja Tahun 2024				
					I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		14 = 13 / 5 x 100%		
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan pajak dan retribusi daerah		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						3.569.284.550		72.951.100	-	607.332.500		324.072.300		1.908.182.037		2.912.537.937		81,60
		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah				3.569.284.550,00		72.951.100		607.332.500		324.072.300		1.908.182.037		2.912.537.937		81,60
		Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1		641.043.500,00		24.324.000				76.857.800	1	411.334.100	1	512.515.900	100	79,95
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1		7.063.100,00		1.046.100		900.000		2.040.000	1		1	3.986.100	100	56,44
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1		131.450.900,00		19.250.000		16.930.600		21.970.000	1	31.221.000	1	89.371.600	100	67,99
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	10		211.900.800,00	0	-	0	76.041.200	5	30.660.000	10	34.607.800	15	141.309.000	150	66,69
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1		237.499.800,00		8.558.000		19.694.000		9.280.000	1	171.223.200	1	208.755.200	100	87,90
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1,00		789.913.000,00		6.783.000		150.000.000		-	1	601.740.000	1	758.523.000	100	96,03
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	450		217.211.900,00	50	-	80	1.996.000	160	42.220.000	50	125.994.300	340	170.210.300	76	78,36
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1		35.003.400,00	0	-		1.995.800		1.500.000	1	1.997.600	1	5.493.400	100	15,69
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	65		34.693.200,00	-	79	1.870.900	41	13.909.700	77	17.509.157	197	33.289.757	303	95,95	

[illegible]

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam era otonomi daerah, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber penerimaan Daerah untuk mencapai kemandirian fiskal dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan yang berkelanjutan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditentukan bahwa Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas:

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat memiliki peran strategis dalam menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Manggarai Barat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pelaksanaan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah, serta pemanfaatan potensi atau sumber daya daerah, baik yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah maupun yang terdapat di wilayah daerah bersangkutan, yang mana pemungutannya merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi, yang mana Komponennya terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat tahun 2021 – 2026, maka visi dan misi dalam RPJMD adalah: Visi: “Mabar Bangkit Menuju Mabar Mantap”

Berdasarkan Visi-Misi, Tujuan, Sasaran yang ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat yang tertuang dalam RPJMD, Badan Pendapatan Daerah memiliki Tujuan yaitu Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan dinamis sedangkan sasarannya adalah terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel. Untuk Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Kabupaten Manggarai Barat dalam menyelenggarakan pemerintahan lebih terarah dan terfokus kepada hasil yang akan dicapai. Tujuan jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan tata pemerintahan Badan Pendapatan Kabupaten Manggarai Barat yang baik, bersih, dan profesional
- b) Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat telah menetapkan sasaran perangkat daerah dalam rangka mencapai tujuan adalah sebagai berikut

1. Meningkatnya tata kelola organisasi Adapun tata kelola organisasi Badan Pendapatan Daerah mencakup kualitas perencanaan dan pelaporan organisasi, kualitas pelayanan internal organisasi, kualitas penatausahaan keuangan, dan pengawasan internal organisasi.
2. Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah

3.3 Program Dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyediaan Bahan/Material
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

- Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
 - Perencanaan pengelolaan pajak daerah
 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.

- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
- Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- Penetapan Wajib Pajak Daerah
- Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- Penagihan Pajak Daerah
- Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
- Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta kebijakan yang telah dijelaskan sebelumnya, disusun program-program urusan pemerintahan bidang pendapatan dengan prioritas program beserta indikator kinerja program. Dalam perencanaan pembangunan daerah, ditetapkan program-program pembangunan daerah, yaitu program yang untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, serta program penyelenggaraan pemerintahan, yang merupakan program prioritas OPD berkaitan dengan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi OPD yang mendukung pencapaian visi dan misi kepala Daerah.

Badan Pendapatan Kabupaten Manggarai Barat mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan Misi kelima yaitu :Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Kapabel, dan Melayani, pencapaian kinerjanya dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah, Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. Badan Pendapatan Daerah memiliki rencana program dan pendanaan Program kegiatan untuk tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1 Rencana Kerja Dan Anggaran Tahun 2025

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Manggarai Barat Tahun Anggaran 2025										

Organisasi : Badan Pendapatan Daerah

**Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan**

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
Badan Pendapatan Daerah													
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	02				KEUANGAN								
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			Rp. 3.284.468.400,00	Rp. 250.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 3.534.468.400,00	Rp. 0,00
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			Rp. 3.284.468.400,00	Rp. 250.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 3.534.468.400,00	Rp. 0,00
5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 552.712.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 552.712.000,00	Rp. 0
5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 5.250.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 5.250.000,00	Rp. 0
5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 130.510.900,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 130.510.900,00	Rp. 0
5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 278.318.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 278.318.000,00	Rp. 0

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								Tahun - 1	Tahun N				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)
5	02	04	2.01	0005	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 196.209.800,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 196.209.800,00
5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 432.489.500,00	Rp. 250.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 682.489.500,00
5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 810.571.400,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 810.571.400,00
5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 26.693.400,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 26.693.400,00
5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 19.023.200,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 19.023.200,00
5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 383.350.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 383.350.000,00
5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 17.414.400,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 17.414.400,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua KelDesa		Rp. 406.202.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 406.202.000,00	Rp. 0
5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua KelDesa		Rp. 25.723.800,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 25.723.800,00	Rp. 0
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 6.406.846.293,67	Rp. 230.298.801,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 6.637.145.094,67	Rp. 0,00
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 9.108.900,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 9.108.900,00	Rp. 0,00
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua KelDesa		Rp. 7.108.900,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 7.108.900,00	Rp. 0
5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua KelDesa		Rp. 2.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 2.000.000,00	Rp. 0
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 5.700.105.793,67	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 5.700.105.793,67	Rp. 0,00
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua KelDesa		Rp. 5.552.325.793,67	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 5.552.325.793,67	Rp. 0
5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua KelDesa		Rp. 147.780.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 147.780.000,00	Rp. 0
5	02	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				Rp. 800.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 800.000,00	Rp. 0,00
5	02	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua KelDesa		Rp. 800.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 800.000,00	Rp. 0
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp. 75.310.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 75.310.000,00	Rp. 0,00
5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua KelDesa		Rp. 75.310.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 75.310.000,00	Rp. 0

Kode				Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
							Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp. 444.067.100,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 444.067.100,00	Rp. 0,00
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 2.663.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 2.663.000,00	Rp. 0
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 42.198.200,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 42.198.200,00	Rp. 0
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 60.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 60.000.000,00	Rp. 0
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 22.500.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 22.500.000,00	Rp. 0
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 0,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0
5	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 7.511.900,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 7.511.900,00	Rp. 0
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 150.400.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 150.400.000,00	Rp. 0
5	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 7.400.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 7.400.000,00	Rp. 0
5	02	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 151.394.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 151.394.000,00	Rp. 0
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp. 154.500,00	Rp. 31.976.200,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 32.130.700,00	Rp. 0,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 154.500,00	Rp. 31.676.200,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 32.130.700,00	Rp. 0
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 28.439.500,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 28.439.500,00	Rp. 0,00
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 14.855.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 14.855.500,00	Rp. 0
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 13.584.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 13.584.000,00	Rp. 0
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 148.860.500,00	Rp. 198.322.601,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 347.183.101,00	Rp. 0,00
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Penzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 130.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 130.000.000,00	Rp. 0
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 18.860.500,00	Rp. 198.322.601,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 217.183.101,00	Rp. 0
Jumlah									Rp. 9.691.314.693,67	Rp. 480.298.801,00			Rp. 10.171.613.494,67	
								Kab. Manggarai Barat..... Kepala Badan Pendapatan Daerah						
								Maria Yuliana Rotok, MM NIP. 198105092010012016						

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025. Dengan adanya Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 akan sangat membantu dalam penyusunan rencana perubahan anggaran sehingga lebih tepat untuk melaksanakan kegiatan yang diprioritaskan. Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 dan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat 2021-2026 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah.

Selanjutnya semoga Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 ini dapat dijalankan dengan baik.

Labuan Bajo, 24 Januari 2025

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Manggarai Barat



Maria Yuliana Rotok, MM

Pembina, IV/a

Nip :198105092010012016